

PENGARUH INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN ANTARDAERAH DI JAWA TENGAH

Krismanti Tri Wahyuni
Politeknik Statistika STIS
email: krismanti@stis.ac.id

Abstrak

Pembahasan mengenai ketimpangan tidak akan habis selama pembangunan dilaksanakan karena pemerataan pembangunan antardaerah menjadi salah satu ciri pembangunan yang diharapkan. Perubahan struktur perekonomian dari sektor alam kepada sektor manufaktur telah menyebabkan lapangan usaha di Jawa Tengah didominasi oleh kegiatan industri. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan ketimpangan antardaerah di Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Bonet. Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengan fixed effect model dan metode estimasi *Seemingly Unrelated Regression (SUR)* karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan sumber daya yang unik setiap daerah. Berdasarkan model yang terpilih, dapat dibuktikan bahwa peningkatan sektor industri berpengaruh signifikan meningkatkan ketimpangan antardaerah. Demikian juga nilai ekspor neto, penerimaan daerah selain pajak dan kondisi demografi baik jumlah penduduk maupun rata-rata lama sekolah. Sementara itu infrastruktur kesehatan dan restoran serta peningkatan sektor pertanian yang berpengaruh signifikan menurunkan Indeks Bonet. Walaupun sektor industri mendominasi perekonomian Jawa Tengah, namun peningkatan sektor ini tidak dapat dipisahkan dari peranan sektor pertanian untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Keywords: ketimpangan antardaerah, indeks bonet, industri, pertanian, data panel.

1. PENDAHULUAN

Indikator pembangunan ekonomi yang umumnya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Namun, pembangunan multidimensi yang disebutkan dalam Todaro dan Smith (2006) menempatkan PDRB dan pertumbuhannya sebagai syarat untuk dapat menikmati keberhasilan pembangunan. Artinya, pembangunan yang berkualitas adalah mengelola PDRB dengan pertumbuhan yang tinggi tetapi juga termasuk penurunan ketimpangan antarpenduduk dan antardaerah serta pemberantasan kemiskinan yang dapat menghambat peningkatan PDRB.

Sebagaimana banyak daerah lainnya di Indonesia, Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan PDRB-nya dengan pertumbuhan lebih dari 5 persen per tahun selama satu dekade ini. Jawa Tengah juga merupakan daerah yang berhasil mengubah struktur perekonomian, yang awalnya didominasi oleh sektor alam (pertanian) menjadi sektor industri manufaktur. Sumbangan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri (34,50 persen) telah jauh

meninggalkan pertanian (14,04 persen) pada tahun 2018. Capaian ini didukung dengan pertumbuhan sektor industri (4,35 persen) yang juga lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian (2,63 persen). Angka ini berkebalikan dengan persentase penduduk yang bekerja pada kedua sektor. Berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2018, penduduk yang mempunyai lapangan usaha utama sektor pertanian mencapai 24,38 persen, melebihi sektor industri (21,78 persen) pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan perbedaan produktivitas pada kedua sektor ekonomi. Jika kondisi seperti ini terjadi terus-menerus, dapat dipastikan kedua sektor akan semakin jauh jaraknya dan tidak dapat bertemu pada satu titik.

Jika dilihat menurut daerah, kontribusi sektor industri cukup beragam, antara 8 persen hingga 81 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian relatif lebih rendah (antara 0,5 persen sampai dengan 41 persen) pada tahun 2016 dan variasinya lebih rendah juga dibandingkan dengan sektor industri. Keberagaman daerah menyebabkan perbedaan perkembangan perekonomian antardaerah di Jawa Tengah, yang

ditunjukkan dengan capaian PDRB yang beragam, pertumbuhan ekonomi dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbeda-beda pula, yaitu antara 63,98 hingga 81,19 pada tahun 2016.

Perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis antardaerah menyebabkan disparitas pembangunan (Sjafrizal, 2008). Adisasmita (2005) melihat pendekatan sektoral dalam melakukan analisis keberhasilan pembangunan sehingga keterkaitan antarsektor juga dipandang sebagaimana interaksi pembangunan antardaerah yang menjadi salah satu penyebab disparitas. Simon Kuznets dalam Todaro dan Smith (2006) sudah merumuskan hipotesis bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan masih tinggi, mencapai puncaknya dan akan menurun seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan pendapatan wilayah (diilustrasikan dengan kurva U terbalik). Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan terjadi karena proses urbanisasi (perbedaan faktor produksi antardaerah) dan industrialisasi (perbedaan faktor produksi antar sektor) pada tahap awal pembangunan ekonomi.

Perubahan struktur perekonomian yang terjadi di Jawa Tengah belum dapat menekan ketimpangan pendapatan antarpendinguduk dan antar wilayah, dilihat dari gini rasio sebesar 0,378 pada tahun 2018 dan Indeks Williamson yang masih mencapai 0,6234 pada tahun 2017 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019). Proses industrialisasi yang menjadikan sektor industri menjadi lapangan usaha yang dominan di Jawa Tengah ternyata tidak berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat pemeratakan tingkat pendapatan antardaerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui peranan sektor industri dalam perekonomian Jawa Tengah dan selanjutnya merumuskan determinan ketimpangan pendapatan antardaerah di Jawa Tengah.

2. KAJIAN LITERATUR

Salah satu pelopor studi ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah Sjafrizal (2008), yang menyebutkan beberapa penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah yaitu: (i) perbedaan kandungan sumber daya alam, yang akan memengaruhi

kegiatan produksi dan daya saing produk yang dihasilkan; (ii) perbedaan kondisi demografis, yang berpengaruh terhadap produktivitas, meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja masyarakat; (iii) kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi penduduk; (iv) konsentrasi kegiatan ekonomi, yang disebabkan oleh: sumber daya alam yang lebih banyak dan lahan yang subur, fasilitas transportasi dan kondisi demografis (kependudukan) yang terkonsentrasi; (v) alokasi dana pembangunan antarwilayah (investasi dari pemerintah). Alokasi investasi pemerintah ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Bila sistem yang dianut otonomi, dana pemerintah lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antardaerah akan cenderung lebih rendah. Sjafrizal (2008) menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari ukuran ketimpangan Indeks Williamson dan Indeks Theil.

Sedangkan Bonet (2006) mengemukakan ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan menggunakan konsep PDRB per kapita yang disebut dengan Indeks Bonet. Sama halnya dengan Indeks Williamson dan Indeks Theil, nilai 1 menunjukkan ketimpangan antardaerah yang sangat timpang dan nilai yang mendekati nol menunjukkan pembangunan yang semakin merata. Indeks Bonet merupakan nilai mutlak dari perbandingan selisih PDRB kabupaten/kota dan PDRB provinsi (wilayah di atasnya), dibandingkan dengan PDRB provinsinya. Analisis ini lebih memungkinkan untuk analisis level kabupaten/kota dari sisi ketersediaan data.

Penelitian mengenai ketimpangan di Indonesia sudah banyak dilakukan. Kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat heterogen menyebabkan analisis ketimpangan di Indonesia menjadi topik yang menarik dan tidak pernah habis untuk digali dan dikembangkan. Afandi, Rantung dan Marashdeh (2017) mengkaji pengaruh perubahan struktur ekonomi, finansialisasi, dan kondisi sosial terhadap ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data panel.

Kenaikan share sektor pertanian dan jasa mengurangi ketimpangan sedangkan kemiskinan dan angka partisipasi kuliah justru meningkatkan ketimpangan, yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan di Indonesia belum mencapai titik balik. Dengan menggunakan metode yang sama, Hidayat, Darwin dan Hadi (2018) menemukan bahwa sumber ketimpangan antardaerah di Riau berasal dari dalam wilayah pengembangan dan variabel-variabel yang dapat menurunkan ketimpangan adalah desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, IPM dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Muchlis dkk (2017) menjelaskan dengan menggunakan model simultan panel bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan antardaerah di Sumatera Selatan, sedangkan aglomerasi industri manufaktur yang menurunkan ketimpangan pendapatan. Lebih jauh Aginta, Soraya dan Santoso (2018) menemukan bahwa inklusi keuangan akan mengurangi kesenjangan antarprovinsi di Indonesia jika kondisi keuangan setempat mendukung masyarakat memanfaatkan akses keuangan untuk kegiatan produktif yaitu sektor industri pengolahan dan pertambangan, bukan pada sektor pertanian.

Baymul dan Sen (2019) menganalisis hubungan antara transformasi struktural dan ketimpangan yang disebutkan oleh Kuznets. Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa justru meningkatkan ketimpangan di 32 negara berkembang karena perpindahan tenaga kerja pertanian ternyata bukan ke sektor industri, tetapi ke sektor jasa. Sedangkan Islam, Lib dan Fatemac (2017) menunjukkan bahwa perdagangan dan teknologi meningkatkan perbedaan ketimpangan kelompok pendapatan di negara-negara berkembang. Sementara itu Kyriacoul, Gallo dan Sagales (2015) meneliti 23 negara OECD dan menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal disertai dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang efektif mengurangi ketimpangan regional. Demikian juga di 234 kota di Afrika Selatan, desentralisasi fiskal mengurangi ketimpangan pendapatan antarkota, namun desentralisasi yang berbasis pengeluaran justru meningkatkan kesenjangan. Di Amerika, desentralisasi pendapatan efektif mencegah inflasi sedangkan desentralisasi pengeluaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi

mendorong terjadinya inflasi dan mengurangi distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat (Bojanic, 2016).. Sedangkan di Eropa Tengah dan Timur, pengaruh desentralisasi fiskal tergantung pada sumber keuangan pemerintah daerah berupa transfer antarpemerintah yang berperan pemeratakan pendapatan (Makreshanska dan Petevski, 2016). Pengaruh desentralisasi fiskal bisa berbeda di setiap wilayah.

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2010 hingga 2016, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan BPS Provinsi Jawa Tengah, dengan beberapa publikasi berbagai tahun, yaitu: Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, Jawa Tengah dalam Angka, Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Statistik Daerah Jawa Tengah, Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah, Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi dan sebagainya.

Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Bonet, yang dihitung dengan rumus:

$$IB_{it} = \left| \frac{PDRBP_{it}}{PDRBP_{prov,t}} - 1 \right|$$

Keterangan:

- IB_{it} : Indeks Bonet di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
- $PDRBP_{it}$: PDRB per kapita di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
- $PDRBP_{prov,t}$: PDRB per kapita provinsi pada tahun ke-t

Variabel independen yang digunakan dalam model didasarkan pada teori yang disampaikan oleh Sjafrizal. Sumber daya alam diproksi dengan variabel sektor pertanian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak. Jumlah penduduk digunakan sebagai proksi kuantitas dari sumber daya manusia dan rata-rata lama sekolah sebagai proksi untuk melihat kualitas dari kondisi demografis. Mobilitas barang dan jasa merupakan variabel yang tidak pernah digunakan dalam penelitian antardaerah pada

level kabupaten/kota karena keterbatasan data. Penelitian ini menggunakan data net ekspor (ekspor dikurangi impor) untuk melihat keterbukaan perdagangan antardaerah sesuai dengan penelitian Aginta, Soraya dan Santoso (2018). Konsentrasi kegiatan ekonomi diproksi dengan 3 variabel yaitu sektor industri, jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah restoran. Sedangkan alokasi dana pembangunan diproksi dengan menggunakan rasio PAD terhadap belanja modal, untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan fisik.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensia yang membangun model regresi. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, analisis LQ (*Location Quotient*) dan Tipologi Klassen untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Metode LQ digunakan untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan *base sector* dan *nonbase sector* serta merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama di suatu wilayah terhadap wilayah referensi yang lebih besar (Baransano dkk, 2016). Nilai LQ > 1 menunjukkan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah atau secara relatif kegiatan ekonomi pada sektor tersebut terkonsentrasi pada daerah tersebut dibandingkan di tingkat referensi atasnya (provinsi) atau disebut juga memiliki keunggulan komparatif. Jika LQ = 1, daerah tersebut cenderung tidak melakukan transaksi dengan daerah lain dan jika LQ < 1 artinya pangsa sektor di daerah tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat provinsi (nonbasis). Asumsi dalam LQ adalah keseragaman dalam produktivitas dan konsumsi rata-rata seluruh daerah. Penghitungan LQ dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{ij}/X_j}{X_i./X_{..}}$$

Keterangan:

X_{ij} : nilai PDRB sektor ke-i di kabupaten/kota ke-j
 X_j : total PDRB di kabupaten/kota ke-j

X_i : nilai PDRB sektor ke-i pada tingkat provinsi

$X_{..}$: total PDRB pada tingkat provinsi

Sedangkan Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuan (provinsi) sekaligus membandingkan PDRB per kapita daerah tersebut dengan PDRB per kapita wilayah acuan (provinsi). Oleh karena itu klasifikasi daerah dengan menggunakan metode ini menghasilkan 4 karakteristik, yaitu: (i) daerah maju dan tumbuh cepat jika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi provinsi dan PDRB per kapita kabupaten/kota lebih tinggi daripada PDRB per kapita provinsi; (ii) daerah sedang berkembang jika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi provinsi dan PDRB per kapita kabupaten/kota lebih rendah daripada PDRB per kapita provinsi; (iii) daerah maju tetapi tertekan jika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi provinsi dan PDRB per kapita kabupaten/kota lebih tinggi daripada PDRB per kapita provinsi; dan (iv) daerah tertinggal jika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi provinsi dan PDRB per kapita kabupaten/kota juga lebih rendah daripada PDRB per kapita provinsi (Sjafrizal, 2008).

Analisis inferensia dilakukan dengan menggunakan regresi dara panel, dengan tingkat signifikansi 5 persen. Model yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$IB_{it} = \alpha_i + \beta_1 Ln(pertanian)_{it} + \beta_2 Ln(PADlain)_{it} + \beta_3 Ln(penduduk)_{it} + \beta_4 MYSS_{it} + \beta_5 NetEkspor_{it} + \beta_6 Ln(industri)_{it} + \beta_7 Ln(kesehatan)_{it} + \beta_8 Ln(restoran)_{it} + \beta_9 RasioPADmodal_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IB_{it} : Indeks Bonet di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
 $Ln(pertanian)_{it}$: nilai logaritma natural sektor pertanian di

	kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$Ln(PADlain)_{it}$: nilai logaritma natural PAD selain pajak di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$Ln(penduduk)_{it}$: nilai logaritma natural jumlah penduduk di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
MYS_{it}	: <i>mean years schooling</i> (rata-rata lama sekolah) di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$NetEkspor_{it}$: ekspor dikurangi impor di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$Ln(industri)_{it}$: nilai logaritma natural sektor industri di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$Ln(kesehatan)_{it}$: nilai logaritma natural jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$Ln(restoran)_{it}$: nilai logaritma natural jumlah restoran (rumah makan) di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t
$RasioPADmodal_{it}$: PAD dibagi belanja modal di kabupaten/kota ke-i pada periode waktu ke-t
α_i	: intersep sesudah dijumlahkan dengan <i>error</i> efek individu (kabupaten/kota)
$\beta_1 \dots \beta_9$: koefisien regresi (<i>slope</i>) dari variabel independen ke-1 sampai ke-9
ε_{it}	: komponen <i>error</i> dari model di kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t

Menurut Baltagi (2005), teknik estimasi yang dilakukan dalam regresi data panel ada 3 yakni *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Selanjutnya, pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji antara CEM dan FEM (Uji Chow), CEM dan REM (Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier*) serta FEM dan REM (Uji Hausman). Jika model terbaik yang terpilih adalah CEM maka metode estimasi

yang tepat adalah *ordinary least square* (OLS). Apabila model terbaik yang terpilih adalah REM maka metode estimasi yang tepat adalah *generalized least square* (GLS). Jika model terbaik yang terpilih adalah FEM maka perlu dilakukan pengujian homoskedastisitas dan *cross sectional correlation*. Apabila homoskedastis, maka metode estimasinya *ordinary least square* (OLS). Apabila heteroskedastis dan tidak terdapat *cross sectional correlation* maka metode estimasi yang digunakan adalah *generalized least square* (GLS) dengan *cross section weight*. Sedangkan apabila terdapat *cross sectional correlation* maka metode estimasi yang digunakan adalah *feasible generalized least square* (FGLS) atau *seemingly unrelated regression* (SUR).

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan asumsi klasik. Jika model terbaik yang terpilih adalah CEM atau FEM dengan metode estimasi OLS, asumsi klasik yang harus diperiksa adalah normalitas, homoskedastisitas, nonautokorelasi, dan nonmultikolinieritas. Namun, jika model terbaik yang diperoleh adalah REM atau FEM dengan metode estimasi GLS atau FGLS atau SUR, asumsi klasik yang diperiksa adalah normalitas dan nonmultikolinieritas saja. Jika ada salah satu asumsi klasik yang tidak terpenuhi, maka kembali ke tahap pemilihan model regresi data panel terbaik dengan terlebih dahulu melakukan transformasi data dan respesifikasi model dengan tujuan untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik tersebut. Apabila seluruh asumsi sudah terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian keberartian model meliputi koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi secara simultan maupun parsial dan terakhir interpretasi model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan antardaerah di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang berbeda dan masih mengalami ketimpangan, baik antar-kelompok pendapatan maupun antarwilayah. Analisis inferensia dalam penelitian ini membahas Indeks Bonet yang mengukur tingkat disparitas pembangunan di kabupaten/ kota terhadap provinsi secara relatif tanpa memerlukan wilayah referensi pada level dibawahnya (kecamatan), sehingga

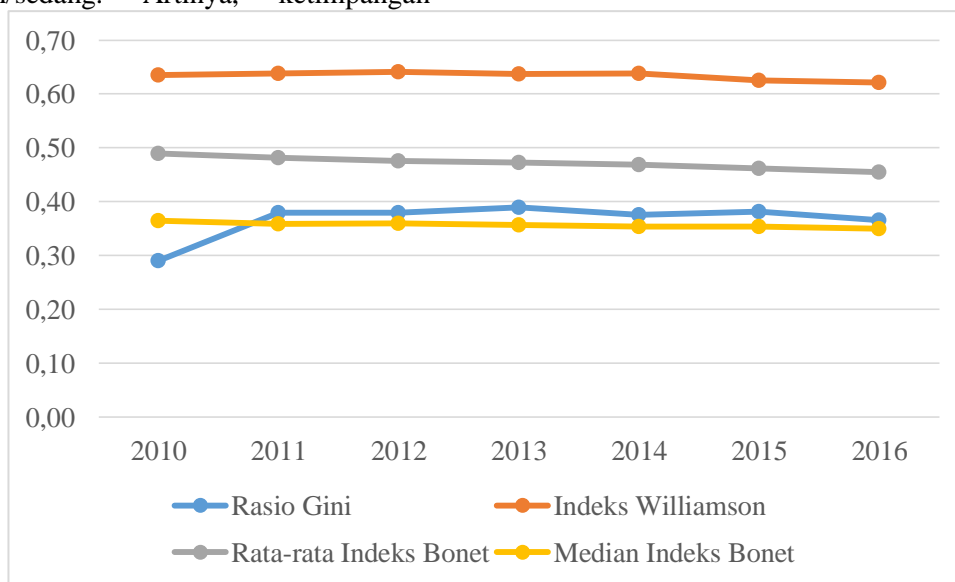
dapat digunakan untuk penelitian pada wilayah administrasi yang kecil.

Tabel 1. Ringkasan Statistik Indeks Bonet Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2016

Keterangan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata	0,4896	0,4814	0,4758	0,4732	0,4687	0,4618	0,4545
Varians	0,2496	0,2317	0,2329	0,2329	0,2312	0,2194	0,2095
Nilai Maksimum	2,5369	2,4061	2,4668	2,4756	2,4879	2,4005	2,3340
Median	0,3647	0,3589	0,3599	0,3571	0,3542	0,3540	0,3504
Nilai Minimum	0,0311	0,0099	0,0019	0,0052	0,0197	0,0326	0,0391
Jangkauan	2,5058	2,3962	2,4649	2,4704	2,4683	2,3679	2,2949

Berdasarkan Tabel 1, Indeks Bonet kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada nilai 0,0391 sampai dengan 2,3340 pada tahun 2016. Angka ini sudah mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2010, tetapi masih berada pada angka menengah/sedang. Artinya, ketimpangan

antardaerah di Jawa Tengah tidak dapat dibilang rendah. Hal ini juga ditunjukkan dengan rasio gini yang masih berada di atas 0,30 dan Indeks Williamson yang masih berada di atas 0,60 selama periode 2010 hingga 2016.



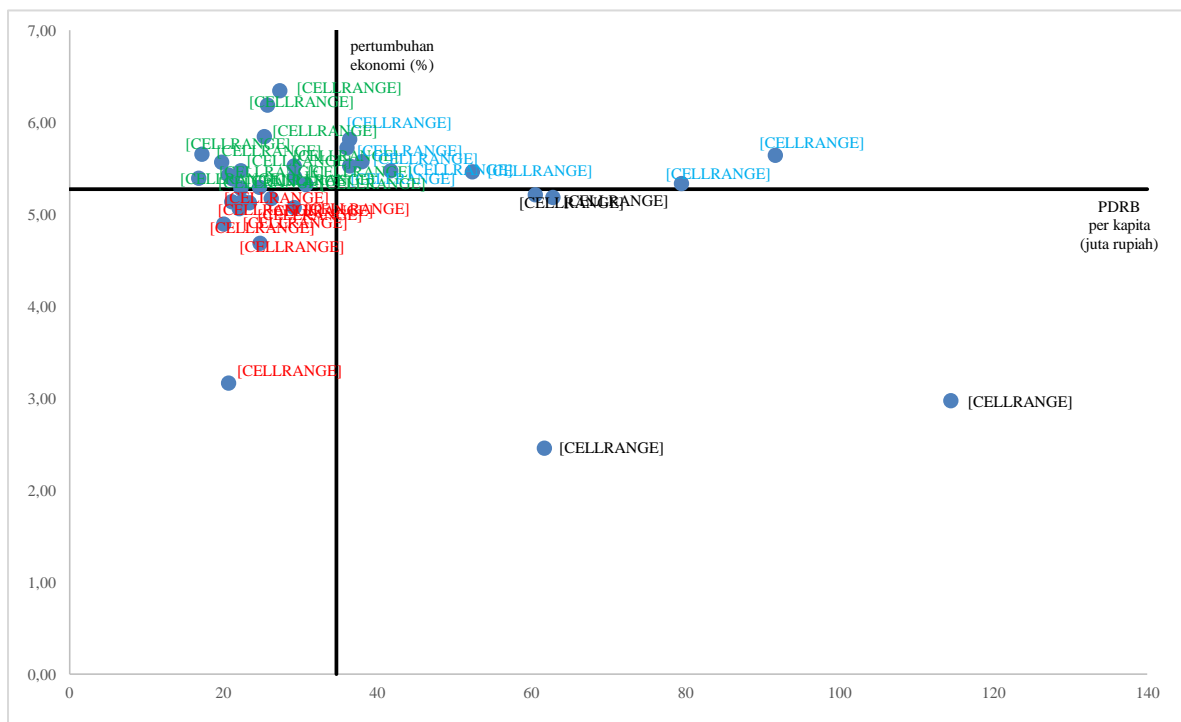
Gambar 1. Beberapa Ukuran Ketimpangan di Jawa Tengah 2010-2016

Median Indeks Bonet yang dihitung dalam penelitian ini merupakan ukuran ketimpangan yang paling rendah, sedangkan rata-ratanya berada di atas rasio gini namun dibawah Indeks Williamson. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Bonet antardaerah di Jawa Tengah tidak berdistribusi normal, rata-ratanya tidak dapat menunjukkan ukuran tengahnya. Hanya beberapa daerah saja yang mempunyai Indeks Bonet yang tinggi, sehingga menjadi outlier. Pada tahun 2016, hanya ada 3 daerah yang mempunyai Indeks

Bonet diatas satu, yaitu Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Tanpa ketiga daerah ini, rata-rata Indeks Bonet tahun 2016 dapat diturunkan menjadi 0,3331 dan mendekati dengan median pada tahun tersebut (0,3316). Ketiga daerah ini merupakan daerah dengan PDRB per kapita yang tertinggi di Jawa Tengah. Kota Semarang dan Kota Surakarta adalah daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju dan tumbuh dengan cepat, sedangkan Kabupaten Kudus merupakan daerah yang basis

perekonomiannya industri dan berada pada klasifikasi daerah maju (berpendapatan

tinggi) namun tertekan (pertumbuhannya dibawah rata-rata provinsi).



Gambar 2. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017

Kabupaten/kota di Jawa Tengah masih banyak yang berada pada klasifikasi daerah tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsinya; masih 9 kabupaten yang mempunyai PDRB per kapita dibawah PDRB per kapita provinsi dan pertumbuhannya juga berada dibawah provinsi. Daerah-daerah tersebut pada umumnya mempunyai perekonomian berbasis sektor pertanian dan tidak berbasis sektor industri, namun ternyata basis industri tidak menjamin daerahnya maju karena Kabupaten Klaten yang berbasis industri juga masih termasuk klasifikasi tertinggal. Demikian juga sebaliknya, tidak semua daerah yang maju dan tumbuh cepat berbasis sektor industri. Sektor industri di Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal tidak termasuk sektor basis, bahkan pertanian juga tidak termasuk sektor basis namun berhasil masuk dalam klasifikasi maju dan tumbuh cepat. Daerah-daerah berkembang tidak ada yang basis perekonomiannya sektor industri Jawa Tengah. Hal ini merupakan informasi penting

dalam perekonomian di Jawa Tengah karena sektor industri merupakan lapangan usaha yang dominan secara rata-rata di Jawa Tengah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ternyata kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih banyak yang basis perekonomiannya adalah pertanian dibandingkan dengan industri. Sektor industri menjadi basis perekonomian hanya di 7 daerah, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Fakta menarik dalam penelitian ini bahwa tidak ada daerah kota yang perekonomiannya berbasis sektor industri sekaligus juga bukan berbasis sektor pertanian, namun semua daerah kota sudah bukan daerah tertinggal. Fenomena kesenjangan di wilayah ini menjadi bahasan yang menarik dan selanjutnya menjadi penting mengetahui determinan ketimpangan antardaerah di Jawa Tengah.

Tabel 2. Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen serta Basis Pertanian dan Industri Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Basis Pertanian	Basis Industri	Tipologi Klassen
1	Cilacap	tidak basis	tidak basis	daerah maju tapi tertekan
2	Banyumas	tidak basis	tidak basis	daerah berkembang
3	Purbalingga	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
4	Banjarnegara	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
5	Kebumen	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
6	Purworejo	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
7	Wonosobo	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
8	Magelang	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
9	Boyolali	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
10	Klaten	tidak basis	basis industri	daerah tertinggal
11	Sukoharjo	tidak basis	basis industri	daerah maju & tumbuh cepat
12	Wonogiri	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
13	Karanganyar	tidak basis	basis industri	daerah maju & tumbuh cepat
14	Sragen	basis pertanian	basis industri	daerah maju & tumbuh cepat
15	Grobogan	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
16	Blora	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
17	Rembang	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
18	Pati	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
19	Kudus	tidak basis	basis industri	daerah maju tapi tertekan
20	Jejara	tidak basis	tidak basis	daerah tertinggal
21	Demak	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
22	Semarang	tidak basis	basis industri	daerah maju & tumbuh cepat
23	Temanggung	basis pertanian	tidak basis	daerah tertinggal
24	Kendal	basis pertanian	basis industri	daerah maju & tumbuh cepat
25	Batang	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
26	Pekalongan	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
27	Pemalang	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
28	Tegal	tidak basis	tidak basis	daerah berkembang
29	Brebes	basis pertanian	tidak basis	daerah berkembang
30	Kota Magelang	tidak basis	tidak basis	daerah maju tapi tertekan
31	Kota Surakarta	tidak basis	tidak basis	daerah maju & tumbuh cepat
32	Kota Salatiga	tidak basis	tidak basis	daerah maju tapi tertekan
33	Kota Semarang	tidak basis	tidak basis	daerah maju & tumbuh cepat
34	Kota Pekalongan	tidak basis	tidak basis	daerah berkembang
35	Kota Tegal	tidak basis	tidak basis	daerah maju & tumbuh cepat

Analisis yang digunakan untuk mengetahui determinan ketimpangan antarwilayah dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Untuk melakukan pemilihan model, digunakan uji Chow, Lagarange Multiplier dan uji

Hausman. Model yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM) dengan pelanggaran pada asumsi homoskedastis dan terjadi *cross sectional correlation*, sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM) dengan *seemingly unrelated*

regression (SUR). Oleh karena itu asumsi yang tidak lagi relevan dilakukan adalah asumsi homoskedastisitas dan nonautokorelasi sehingga tidak perlu dilakukan pengujian terhadap kedua asumsi ini karena model yang terpilih sudah

mengakomodir pelanggaran asumsi ini. Sementara itu sumsi klasik yang masih relevan dan harus dipenuhi adalah multikolinieritas dan normalitas, sehingga pengujian tetap dilakukan untuk kedua asumsi tersebut dan terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Estimasi *fixed effect model* (FEM) dengan *seemingly unrelated regression* (SUR)

Variabel	Koefisien	Standar Error	<i>p-value</i>
Variabel dependen: Indeks Bonet			
Konstanta	-8,3806	1,1497	0,000
Ln (pertanian)	-0,3159	0,0422	0,000
Ln (PAD selain pajak)	0,1244	0,0493	0,012
Ln (penduduk)	0,6419	0,7046	0,000
Rata-rata lama sekolah	0,1523	0,3464	0,000
Net ekspor	1,83E-08	0,0000	0,000
Ln (industri)	0,0691	0,0309	0,025
Ln (kesehatan)	-0,1530	0,5403	0,005
Ln (restoran)	-0,1488	0,0263	0,000
Rasio PAD terhadap belanja modal	0,0007	0,0005	0,142
F-statistik		431,26	
Prob (F-statistik)		0,000	
<i>Adjusted R²</i>		0,6377	

Nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) model yang terpilih sebesar 0,6377 artinya variasi disparitas antardaerah di Jawa Tengah mampu dijelaskan dengan model sebesar 63,77 persen, sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model dalam penelitian ini. Berdasarkan Tabel 3, semua variabel independen signifikan dengan tingkat kepercayaan 95 persen selain rasio PAD terhadap belanja modal yang merupakan proksi dari alokasi dana pembangunan. Namun PAD selain pajak yang dihasilkan daerah justru meningkatkan ketimpangan antardaerah, menunjukkan bahwa ketimpangan di Jawa Tengah belum mengalami titik balik, sebagaimana dalam penelitian Afandi, Rantung dan Marashdeh (2017).

Sumber daya alam yang diproksi dengan menggunakan sektor pertanian merupakan variabel utama yang dapat mengurangi ketimpangan antardaerah. Sementara itu sumber daya manusia justru merupakan faktor yang meningkatkan ketimpangan baik dari

sisi jumlah penduduk maupun kualitasnya (rata-rata lama sekolah). Demikian juga lancarnya mobilitas barang dan jasa yang ditunjukkan dengan perdagangan neto keluar daerah, justru meningkatkan ketimpangan antardaerah di Jawa Tengah. Sesuai dengan penelitian Islam, Lib dan Fatemac (2017) yang menunjukkan bahwa perdagangan dapat meningkatkan perbedaan ketimpangan antarnegara berkembang. Hal ini sejalan dengan klasifikasi daerah di Jawa Tengah yang masih banyak termasuk dalam daerah berkembang.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang mampu menurunkan ketimpangan antardaerah, ditunjukkan dengan nilai koefisien dari fasilitas kesehatan dan restoran yang negatif dan signifikan berpengaruh terhadap Indeks Bonet. Fasilitas umum ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas penduduk terutama tenaga kerja. Di sisi lain, konsentrasi kegiatan industri justru meningkatkan ketimpangan antardaerah. Daerah-daerah yang maju dalam sektor

industri ternyata tidak merata ke seluruh Jawa Tengah, dibuktikan dengan analisis LQ sebelumnya bahwa mayoritas daerah-daerah di Jawa Tengah masih berbasis sektor pertanian. Perubahan struktur perekonomian di wilayah ini menimbulkan masalah baru dalam pemerataan pembangunan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius oleh pengambil kebijakan. Perkembangan sektor industri perlu melihat basis perekonomian daerah yang mayoritas masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor sekunder ini harus menjadi sektor lanjutan dalam mengolah sektor basisnya sehingga perkembangan sektor industri memberikan *multiplier effect* terhadap sektor pertanian yang mampu memegang peranan penting dalam menurunkan ketimpangan antardaerah di Jawa Tengah.

5. KESIMPULAN

Jawa Tengah masih mempunyai masalah dalam ketimpangan antardaerahnya, ditunjukkan dengan beberapa ukuran ketimpangan antara lain rasio gini, Indeks Williamson dan Indeks Bonet. Indeks Bonet digunakan dalam penelitian ini karena dapat digunakan tanpa referensi wilayah dibawahnya sehingga mampu menggambarkan ketimpangan antardaerah kabupaten/kota. Rata-rata Indeks Bonet kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak dapat menunjukkan nilai tengahnya karena terdapat daerah yang menjadi *outlier*. Beberapa daerah yang mempunyai pendapatan tertinggi di Jawa Tengah merupakan daerah yang jauh pendapatannya dari rata-rata pendapatan daerah lainnya.

Didominasi oleh daerah yang sedang berkembang, perekonomian daerah-daerah di Jawa Tengah ternyata didominasi oleh perekonomian berbasis sektor pertanian, walaupun struktur perekonomian secara umum didominasi oleh sektor industri. Hal ini menyebabkan perkembangan sektor industri justru meningkatkan ketimpangan antardaerah di Jawa Tengah, berkebalikan dengan sektor pertanian yang mampu mempunyai peranan utama dalam menurunkan ketimpangan antardaerah.

Pengaruh kondisi demografis baik kuantitas maupun kualitasnya terhadap

ketimpangan dalam penelitian ini adalah positif, demikian juga lancarnya mobilitas barang dan jasa (*net eksport*). Dana pembangunan berupa PAD selain pajak juga signifikan berpengaruh meningkatkan ketimpangan antardaerah di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian di wilayah ini masih belum mencapai titik balik. Fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang mampu menurunkan ketimpangan antardaerah dan juga banyaknya restoran yang menjadi proksi dari konsentrasi ekonomi.

6. REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afandi, Akhsyim, Vebryna Permatasari Rantung dan Hazem Marashdeh. 2017. *Determinants of income inequality*. Economic Journal of Emerging Markets, 9(2) Oktober 2017, 159-171.
- Aginta, Harry, Debby A. Soraya dan Wahyu B. Santoso. 2018. *Financial Development and Income Inequality in Indonesia: A Sub-national Level Analysis*. Economics and Finance in Indonesia Vol. 64 No. 2, December 2018: 111-130.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data Third Edition*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Baransano dkk. 2016. *Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol. 27(2): 119-136.
- Baymul, Çinar dan Kunal Sen. 2019. *Kuznets Revisited: What Do We Know about the Relationship between Structural Transformation and Inequality?*. Asian Development Review, Vol. 36, No. 1: 136-167.
- Bojanic, Antonio N. 2016. *The Impact of Fiscal Decentralization on Growth, Inflation, and Inequality in the Americas*. Tulane Economics Working Paper Series Working Paper 1610 August 2016.
- Bonet, Jaime. 2006. *Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience*.

- Springer-Verlag, *The Annals of Regional Science* vol 40(3):661-676.
- Hidayat, Muhammad, Ranti Darwin dan M. Fikry Hadi. 2018. *Inequality of Interregional Development in Riau Indonesia; Panel Data Regression Approach*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2018, 8(5), 184-189.
- Islam, Mohammad Monirul, Zhaohua Lib dan Farha Fatemac. 2017. *The effects of sectoral trade composition on inequality: evidence from emerging economies*. *Asian Journal of Empirical Research* Volume 7, Issue 8(2017): 202-224.
- Kyriacoul, Andreas P., Leonel Muinelo-Gallo dan Oriol Roca-Sagalés. 2015. *Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous Equations*. GEN - Governance and Economics research Network GEN Working Paper A 2015 – 1.
- Makreshanska, Suzana dan Goran Petevski. 2016. *Decentralization, fiscal transfers and income inequality in Central and Eastern European countries*. MPRA Paper No. 82181, Posted 26 October 2017 22:26 UTC.
- Muchlis dkk. 2017. *Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, And Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017, 7(4), 214-224.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat: Baduose Media.
- Todaro, M. dan S. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9*. Jakarta: Erlangga.